

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayumedia.
- Airlangga, S. P. (2019). *Maladministrasi Pelayanan Penyelesaian Sengketa Tanah di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung*. Universitas Lampung.
- Alam., D. R. (2023). *Optimalisasi Basis Data Pertanahan Melalui Peningkatan Kualitas Data Hak Guna Usaha di Kabupaten Cianjur*. Laporan Aksi Perubahan. Cianjur.
- Amalina., R. N. (2022). *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Sosialisasi Door to Door dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Cianjur*. Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS BerAkhlak. Cianjur.
- Amrin, R. N., Imantaka, A. H., Yanengga, E. T. N., Maulida, G. C. (2022). Status Hukum Hak Atas Tanah yang Terkena Bencana Alam. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(1), 1-12.
- Arnstein., S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Austin, J. E., & Seitanidi, M. M. (2012). Collaborative Value Creation: A Review of Partnering Between Nonprofits and Businesses: Part I. Value Creation Spectrum and Collaboration Stages. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 41(5), 726–758.
- Badan Geologi (2023). *Bumi Cianjur Berguncang: Geologi Menyelidiki dan Memitigasi*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bandung.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). *Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kecamatan Cugenang Dalam Angka 2021*. <https://cianjurkab.bps.go.id>.

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kecamatan Cugenang Dalam Angka 2023*.
<https://cianjurkab.bps.go.id>.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication.
- Fada, H.L.N. (2022). Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Girilayu. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat*. 7(1), 1-19.
- Hardianingsih, A. T. (2019). *Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Universitas Gadjah Mada.
- Hardianto. (2017). Pengaruh Ekonomi terhadap Pendidikan dan Peran Pendidikan Membangun Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Islam*. 6(1). 1-3.
- Hartana., Udiani, M. C. S. (2020). Eksistensi Hukum Agraria dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Timbul di Bali. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksa*. 8(3), 1-7.
- Hamdani, I. N., Handoko., Yeffry. (2017). Perencanaan Tahapan Prioritas Strategi Berdasarkan Kebijakan yang Ada di Bagian Informatik Sekretariat Daerah Kabupaten Garut untuk Merealisasikan *E-Government*. *Jurnal Tata Kelola dan Kerangka Kerja Teknologi Informasi*, 3(1), 1-6.
- Hermana, D., Barlian, U.C. (2022). Komunikasi dalam Organisasi. *Media Neliti*.
- Hutabarat, L. E. (2023). Tinjauan Geologis Gempa Cianjur November 2022. *Jurnal Rekayasa Teknik Sipil dan Lingkungan*. 4(1). 1-7.
- Jamaluddin., Nursadrina., Nasrullah, M., Darwis., Salam, R. (2022). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. *Jurnal Palangga Praja*, 3(2), 1-7.
- Jayanti., N.W. (2023). Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Public Governance di Indonesia. *Journal of Contemporary Public Administration*. 3(2), 1-8.

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. (2023). *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023*. <https://jdih/atrbpn/go.id>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2022). *Gempa 5,6M Guncang Cianjur, Badan Geologi Segera Kirim Tanggap Darurat*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/gempa-m56-guncang-cianjur-badan-geologi-segera-kirim-tanggap-darurat->.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2017). *Menko Perekonomian Hadiri Konferensi Tenurial 2017*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/1905/menko-perekonomian-hadiri-konferensi-tenurial-2017>.
- Lumalente, S. (2017). Hapusnya Hak Milik Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lex Privatum*, 5(6), 1-10.
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Media Indonesia. (2022). *830 Ribu Bidang Tanah di Kabupaten Cianjur Belum Bersertifikat*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/509372/830-ribu-bidang-tanah-di-kabupaten-cianjur-belum-bersertifikat>.
- Nurhayati, S., Medaline, O., Sari, A.K. (2021). Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Kesejahteraan Masyarakat. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*.
- Nursyabani., Putera, R. E., Kusdarini. (2020). Mitigasi Bencana Dalam Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Gempa Bumi Di Universitas Andalas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 8(2), 1-10.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods (3 ed.)*. California: Sage Publishing.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Prihananto, F. G., & Muta'ali, L. (2013). *Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) di Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*. Universitas Gadjah Mada.
- Prihatin, R. B. (2015). Alih Fungsi Lahan di Perkotaan (Studi Kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta). *Jurnal DPR RI*, 6(2), 1-14.
- Putri, B. W. (2020). *Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Sukoharjo*. Universitas Gadjah Mada.
- Ratode, H. K., Nugroho, T., Sufyandi, Y. 2021. Analisis Perubahan Bidang Tanah Terdaftar Akibat Gempabumi dan Likuifaksi Palu 2018. *Jurnal Tunas Agraria*. 4(1), 1-13.
- Rakhmawan, M. U., Sutaryono., Setiowati. (2019), Potensi Pengadaan Tanah Berbasis Kebencanaan di Kota Palu. *Jurnal Tunas Agraria*, 2(3), 1-18).
- Ridwan, S. K., Pinori, J. J., Palilingan, T. N. (2023). Pembentukan Peraturan Desa dalam Kaitannya dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lex Administratum*. 9(4). 1-4.
- Robinson, O. C. (2014). Sampling in Interview-based Qualitative Research: A Theoretical and Practical Guide. *Qualitative Research in Psychology*, 11(1), 25-41.
- RR Puspita, N. A. H. (2021). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Tanah Timbul (Wedi Kengser) Bantaran Sungai Gajahwong (Studi Kasus Kampung Gendeng, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta)*. Universitas Gadjah Mada.
- Rudianto, H., Heriyanto, M. (2022). Penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ngada. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*. 14(1), 1-12.

- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sartohadi, J., Suratman., Jamulya., Dewi, N. I. S. (2012). *Pengantar Geografi Tanah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sinaga, F., & Supsilani. (2016) Fungsi Tanah dan Kaitannya dengan Konflik Tanah pada Masyarakat Batak Toba. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*. 2. (1), 14-30.
- Subarsono, (2009). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tandobala, L. (2011). *Pendekatan Untuk Menentukan Kawasan Rawan Bencana di Pulau Sulawesi*. Universitas Sam Ratulangi.
- Thabrani. A. B., Hakim. H., Darmanto. (2022). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL): Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*, 3(1), 1-16.
- Tomtomo, J.P. (2017). *Cacah Agraria dan Hak Dasar Rakyat*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2017/10/07/cacah-agraria-dan-hak-dasar-rakyat>.
- Trianingtias. R., Permadi. I., Koeswahyono. I. (2022) Status Hukum Hak Milik Atas Tanah yang Terdampal Likuefaksi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 282-292.
- Ulber, S. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- UNDP. (2011). *Capacity for Disaster Reduction Initiative (CADRI)*. <https://www.undp.org/geneva/capacity-disaster-reduction-initiative-cadri>.

- UNISDR. (2004). *Living with risk: a global review of disaster reduction initiatives*. In UN Publications. UNISDR. <https://doi.org/9211010640>
- Widodo (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kebumen (Studi Kasus di Desa Krakal Kecamatan Alian dan Desa Pecarikan Kecamatan Prembun)*. Universitas Gadjah Mada.
- Yin, R. K. (2006). *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Press.